



ANALISIS PERMASALAHAN BANJIR DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DI SUKAMENANTI, KEDATON, BANDAR LAMPUNG

Rizki Septia Pratiwi¹⁾, Della Soraya²⁾, Nur Hidayah Anggraini³⁾, Anung Mabilla⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾

- ¹⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: rizkiseptiapratiwi14@gmail.com
- ²⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: dellatoraya190@gmail.com
- ³⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nurhidayahanggraini12@gmail.com
- ⁴⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: anungmabila55@gmail.com
- ⁵⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

Abstract

Flooding is a common environmental problem in urban areas in Indonesia. Besides being influenced by high rainfall, flooding is also caused by human factors, such as reduced air absorption areas, inadequate drainage conditions, and suboptimal waste management. This problem also occurs on Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Sukamenanti Village, Kedaton District, Bandar Lampung City. This study aims to analyze the causes of flooding, its impacts, and mitigation efforts from a public policy perspective. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the RT Head and the local community were then analyzed descriptively to describe the flood conditions and mitigation efforts. The results show that flooding is caused by high rainfall, limited drainage capacity, narrowing of water channels, reduced absorption areas, and suboptimal waste management. The resulting impacts include disruption of community activities, economic losses, and environmental degradation. Mitigation efforts include community cooperation activities, drainage cleaning, waste management, and cooperation between the government and the community. However, these efforts still need to be enhanced through improvements to drainage infrastructure, additional air catchment areas, and strengthening community participation so that flood management can be more effective and sustainable.

Keywords: Floods; drainage; public policy; community participation; flood management.

Abstrak

Banjir merupakan masalah lingkungan umum di daerah perkotaan di Indonesia. Selain dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan oleh faktor manusia, seperti berkurangnya area penyerapan udara, kondisi drainase yang tidak memadai, dan pengelolaan sampah yang suboptimal. Masalah ini juga terjadi di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyebab banjir, dampaknya, dan upaya mitigasinya dari perspektif kebijakan publik. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari Kepala RT dan masyarakat setempat kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi banjir dan upaya mitigasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi, kapasitas drainase yang terbatas, penyempitan saluran air, berkurangnya area penyerapan, dan pengelolaan sampah yang suboptimal. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan aktivitas masyarakat, kerugian ekonomi, dan degradasi lingkungan. Upaya mitigasi meliputi kegiatan kerja sama masyarakat, pembersihan drainase, pengelolaan sampah, dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, upaya-upaya ini masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan infrastruktur drainase, area penampungan udara tambahan, dan penguatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Banjir; Drainase; Kebijakan Publik; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Banjir



LATAR BELAKANG

Banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perkotaan Indonesia. Selain dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air, perubahan tata guna lahan, kondisi drainase yang kurang memadai, serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Akibatnya, banjir dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan bagi masyarakat. (Jauhari et al., 2025).

Penanganan banjir memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan publik yang tepat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan lingkungan. Namun, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase.

Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan banjir adalah Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kawasan ini merupakan daerah permukiman yang cukup padat dengan perkembangan pembangunan yang terus meningkat. Berkurangnya lahan resapan air, kondisi drainase yang belum optimal, serta perilaku sebagian masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya genangan dan banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis penyebab banjir dan upaya penanganannya dalam perspektif kebijakan publik di wilayah tersebut.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dunn (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan perumusan keputusan, tetapi juga mencakup proses implementasi dan evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan solusi terhadap permasalahan publik yang menjadi sasarannya.

Dalam konteks penanganan banjir, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan tindakan untuk mengurangi risiko banjir serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Penanganan banjir tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah,

masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks, termasuk banjir (Sukartara & Romadhona, 2024).

2. Banjir sebagai Permasalahan Publik

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Banjir terjadi ketika volume air melebihi kapasitas sungai, drainase, atau daerah resapan sehingga menyebabkan genangan. Selain dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan kurang optimalnya pengelolaan lingkungan.

Menurut Azizah dkk. (2025), meningkatnya kawasan terbangun dan menurunnya daya resap tanah menjadi faktor yang memperbesar risiko banjir. Kondisi drainase yang kurang memadai juga turut meningkatkan potensi genangan saat terjadi hujan deras. Oleh karena itu, banjir tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam, tetapi juga sebagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah. Banjir dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas masyarakat, serta penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penanganan yang terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan.

3. Upaya Penanganan Banjir

Penanganan banjir merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir. Penanganan ini dapat dilakukan melalui pendekatan struktural, seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, tanggul, dan sumur resapan, serta pendekatan nonstruktural melalui penataan ruang, penyusunan regulasi, sosialisasi mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Menurut Apriliani dkk. (2025), keberhasilan penanganan banjir dipengaruhi oleh kualitas sistem drainase, pengelolaan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana. Oleh karena itu, penanganan banjir memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Banjir

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam penanggulangan banjir, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran drainase, mengikuti kegiatan mitigasi bencana, serta mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan pengurangan risiko banjir. Keikutsertaan masyarakat menjadi

salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program penanggulangan banjir.

Penelitian Irawan, Kushartono, dan Abidin (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, pemikiran, dan kegiatan sosial mampu mendukung efektivitas program penanggulangan banjir di tingkat lokal. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan mitigasi memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana banjir. Selain itu, penelitian Makhfud dan Mursyidah (2024) juga menegaskan bahwa kegiatan membersihkan drainase dan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama dapat membantu mengurangi risiko terjadinya banjir. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan penanganan banjir yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan banjir dan upaya penanganannya dalam perspektif kebijakan publik di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan permasalahan yang terjadi di masyarakat (Moleong, 2021). Sumber data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan Ketua RT dan masyarakat setempat, observasi langsung terhadap kondisi lingkungan dan drainase, serta dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan banjir di lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi faktor penyebab banjir, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Profil singkat wilayah penelitian

Lokasi penelitian berada di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan permukiman perkotaan yang berada di pusat perkembangan Kota Bandar Lampung dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kelurahan Sukamenanti memiliki luas wilayah sekitar 44 hektar yang terbagi ke dalam 2 lingkungan dan 10 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif, Kelurahan Sukamenanti berbatasan dengan Kelurahan Kedaton di sebelah utara, Kelurahan Gedong Air di sebelah barat, Kelurahan Sukamenanti Baru di sebelah selatan, dan Kelurahan Segala Mider di sebelah timur.

Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh rumah-rumah penduduk dengan jarak antarbangunan yang relatif rapat.

Akses jalan lingkungan berupa jalan aspal dan jalan beton yang menghubungkan kawasan permukiman dengan jalan utama di Kelurahan Sukamenanti. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja pada sektor perdagangan, jasa, pegawai swasta, pegawai negeri, serta usaha mikro dan kecil yang berkembang di sekitar kawasan Kedaton.

Sebagai wilayah yang berada di kawasan perkotaan, perkembangan pembangunan permukiman di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 berlangsung cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bangunan tempat tinggal dan berkurangnya lahan terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan menjadi lebih rentan terhadap genangan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, keberadaan saluran drainase yang berada di sepanjang jalan lingkungan menjadi komponen penting dalam mendukung sistem pengelolaan air hujan di kawasan ini.

Secara geografis, lokasi penelitian memiliki karakteristik topografi yang relatif datar hingga landai sehingga aliran air hujan sangat bergantung pada fungsi dan kapasitas saluran drainase yang tersedia. Apabila terjadi penyumbatan akibat sampah atau sedimentasi, aliran air dapat terhambat dan menyebabkan genangan pada beberapa titik permukiman. Oleh karena itu, Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi lingkungan yang relevan untuk mengkaji permasalahan drainase dan banjir perkotaan yang sering terjadi di kawasan permukiman padat penduduk. (Kodepos.co.id, 2026).

b) Kondisi lingkungan dan drainase

Wilayah Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan hunian di Kota Bandar Lampung. Sebagian besar lahan di wilayah ini telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tinggal, sehingga ruang terbuka hijau dan daerah resapan air menjadi semakin terbatas. Kondisi lingkungan didominasi oleh bangunan permanen yang berdiri berdekatan satu sama lain dengan jaringan jalan lingkungan yang relatif sempit. Selain berfungsi sebagai kawasan permukiman, di sekitar lokasi juga terdapat fasilitas ibadah, usaha kecil masyarakat, serta sarana umum yang mendukung aktivitas warga sehari-hari.

Sistem drainase di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 terdiri atas saluran drainase terbuka yang berada di sisi jalan dan terhubung dengan saluran yang lebih besar di kawasan sekitarnya. Saluran drainase tersebut berfungsi untuk menampung dan mengalirkan limpasan



air hujan dari permukaan jalan maupun area permukiman menuju saluran utama. Namun, kondisi beberapa bagian saluran drainase menunjukkan adanya sedimentasi, penumpukan sampah, serta pertumbuhan vegetasi liar yang dapat mengurangi kapasitas aliran air. Selain itu, terdapat beberapa titik saluran yang mengalami penyempitan akibat pembangunan di sekitar area drainase sehingga menghambat kelancaran aliran air. (Cahyono & Miguez, 2024).

Meningkatnya jumlah bangunan dan berkurangnya lahan yang mampu menyerap air menyebabkan sebagian besar air hujan langsung mengalir ke saluran drainase. Pada saat curah hujan tinggi, volume air yang masuk ke dalam saluran sering kali melebihi kapasitas drainase yang tersedia. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran air menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan genangan pada beberapa titik di lingkungan permukiman. Oleh karena itu, keberadaan dan kondisi drainase memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah Jalan Beruang Gang Mushola RT 03.

Secara umum, kondisi lingkungan dan drainase di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air hujan masih memerlukan perhatian dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Upaya seperti pembersihan saluran secara rutin, pengendalian sedimentasi, perbaikan saluran yang rusak, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase menjadi langkah yang diperlukan guna menjaga fungsi drainase dan meminimalkan potensi terjadinya banjir di kawasan tersebut.

c) *Gambaran umum permasalahan banjir*

Banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pada saat terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, beberapa ruas jalan dan area permukiman mengalami genangan air yang dapat bertahan selama beberapa waktu. Kondisi tersebut terjadi karena volume air hujan yang masuk ke sistem drainase melebihi kapasitas saluran yang tersedia sehingga aliran air tidak dapat mengalir secara optimal menuju saluran pembuangan utama.

Permasalahan banjir di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor akibat aktivitas manusia. Dari aspek teknis, beberapa saluran drainase mengalami sedimentasi, penyumbatan sampah, serta penyempitan penampang saluran yang menyebabkan kapasitas tampung air berkurang. Selain itu, kondisi drainase yang

kurang terawat pada beberapa titik juga menghambat kelancaran aliran air saat curah hujan tinggi.

Faktor lain yang turut memperparah terjadinya banjir adalah pesatnya perkembangan kawasan permukiman yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Banyak lahan terbuka yang sebelumnya berfungsi sebagai area infiltrasi telah berubah menjadi bangunan dan permukaan kedap air sehingga air hujan lebih banyak menjadi limpasan permukaan (*runoff*). Akibatnya, volume air yang harus dialirkan melalui sistem drainase meningkat secara signifikan ketika hujan turun.

Selain itu, penyempitan lahan sungai yang berada di sekitar kawasan penelitian juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir. Penyempitan tersebut terjadi akibat pemanfaatan sempadan sungai untuk pembangunan permukiman maupun aktivitas lainnya yang mengurangi lebar alami alur sungai. Kondisi ini menyebabkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air menjadi berkurang. Ketika hujan deras terjadi, air yang seharusnya mengalir melalui sungai tidak dapat tertampung secara maksimal sehingga meluap dan menimbulkan genangan pada kawasan permukiman di sekitarnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan banjir di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas drainase, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, serta penyempitan badan sungai. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang terpadu melalui normalisasi drainase, penataan kawasan sempadan sungai, peningkatan kapasitas saluran, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan guna mengurangi risiko banjir di wilayah penelitian.

B. Penyebab Terjadinya Banjir

a) *Faktor alam (curah hujan)*

Banjir merupakan fenomena hidrologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana curah hujan menjadi pemicu utama yang bersifat alamiah. Ketika intensitas dan durasi hujan melebihi kapasitas penyerapan tanah dan daya tampung sungai, air yang jatuh ke permukaan tidak dapat diserap secara optimal sehingga terjadi limpasan permukaan (*runoff*) yang langsung mengalir ke sungai dan saluran drainase, menyebabkan air meluap dan menggenangi kawasan sekitarnya (Yuri et al., 2025). Secara lebih rinci, faktor alam yang berkontribusi pada kejadian banjir mencakup

curah hujan tinggi, kapasitas sungai yang tidak memadai, kemampuan infiltrasi tanah yang rendah, serta kondisi topografi daerah yang rendah dan cekung (Yuri et al., 2025).

Curah hujan yang turun berulang dalam waktu singkat menyebabkan kejenuhan tanah dan menurunkan kemampuan infiltrasi secara drastis, sehingga air hujan lebih banyak mengalir sebagai limpasan permukaan yang mempercepat terjadinya banjir (Yuri et al., 2025). Kondisi ini semakin berat apabila wilayah yang bersangkutan didominasi permukaan kedap air seperti aspal dan beton, yang lazim ditemukan di kawasan padat penduduk perkotaan. Distribusi curah hujan yang turun merata dalam waktu singkat maupun hujan lebat berkepanjangan di wilayah hulu juga dapat menyebabkan meluapnya aliran sungai di hilir, yang dikenal sebagai banjir kiriman (Yuri et al., 2025).

Hasil wawancara terhadap ketua RT dan warga di wilayah Gang Masjid 3, Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung, secara konsisten menyebutkan curah hujan tinggi sebagai pemicu utama kejadian banjir. Hujan dengan intensitas besar yang berlangsung dalam durasi panjang menyebabkan air tidak sempat meresap ke tanah maupun dialirkan melalui saluran yang tersedia, sehingga menggenangi permukiman warga. Temuan lapangan ini selaras dengan kajian Yutantri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa faktor curah hujan memiliki koefisien regresi sebesar 0,941 dalam memengaruhi kejadian banjir, menjadikannya faktor alam dengan pengaruh paling dominan.

b) *Kondisi drainase*

Sistem *drainase* yang tidak berfungsi optimal menjadi faktor struktural yang secara signifikan memperparah dampak banjir di kawasan permukiman. *Drainase* merupakan rangkaian kegiatan pengaliran air, baik limpasan permukaan maupun air tanah (*underground water*) dari suatu daerah, dan kegagalan sistem ini dalam menjalankan fungsinya secara langsung meningkatkan kerentanan kawasan terhadap genangan dan banjir (Tunjang, 2023).

Kegagalan fungsi *drainase* umumnya dipicu oleh penyempitan dan pendangkalan saluran akibat sedimentasi, penumpukan sampah, maupun keberadaan bangunan permukiman yang tidak tertata (Tunjang, 2023). Banyak sistem *drainase* di kawasan permukiman urban tidak dirancang sesuai standar hidrologi yang mempertimbangkan debit puncak (*peak discharge*) dan kapasitas aliran, sehingga penyempitan saluran menjadi faktor utama yang menghambat laju aliran air menuju saluran pembuangan akhir (Yuri et al., 2025). Dalam situasi tertentu, sampah domestik yang terbawa arus dari wilayah lain

turut memperparah penyumbatan dan mempercepat terjadinya luapan air.

Permasalahan *drainase* yang buruk juga menjadi perhatian dalam kajian kebijakan publik. Penanganan banjir yang bersifat struktural seperti perbaikan dan peningkatan kapasitas *drainase* tidak dapat lepas dari peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur publik. Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah daerah memegang peran sentral dalam pengelolaan banjir perkotaan, mencakup perencanaan, implementasi, serta pemeliharaan infrastruktur drainase sebagai bagian dari layanan publik dasar (Yuri et al., 2025).

Hasil wawancara lapangan di Sukamenanti mempertegas kondisi tersebut. Warga mengeluhkan saluran air yang tersumbat dan tidak mampu mengalirkan debit air saat hujan deras, mencerminkan kebutuhan mendesak akan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur drainase secara berkala sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir jangka panjang.

c) *Pengelolaan sampah dan perilaku masyarakat*

Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah memiliki kontribusi nyata terhadap kejadian banjir, khususnya di kawasan permukiman yang berada di dekat aliran sungai. Penelitian menunjukkan bahwa sebesar 65% responden mengakui perilaku membuang sampah sembarangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan frekuensi banjir, yang mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Rossevelt et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa faktor perilaku manusia tidak dapat diabaikan dalam analisis penyebab banjir.

Sampah, terutama plastik dan sampah rumah tangga, yang dibuang sembarangan kerap menumpuk di saluran *drainase* dan sungai sehingga aliran air tersumbat dan tidak lancar. Saat curah hujan tinggi, air yang tidak dapat mengalir dengan baik akhirnya meluap dan menyebabkan banjir. Kurangnya sarana pembuangan sampah seperti tong sampah dan tempat pengumpulan sementara turut mendorong perilaku masyarakat membuang sampah langsung ke sungai (Yuri et al., 2025). Penyempitan di sungai akibat tumpukan sampah pun mengakibatkan limpasan air hujan ke daratan sekitar ketika hujan berlangsung cukup lama (Yutantri et al., 2023).

Persoalan ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan berkaitan erat dengan dimensi sosial-budaya dan rendahnya kesadaran lingkungan di tingkat masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan tercermin dari kebiasaan membuang sampah dan membiarkannya menumpuk di sepanjang bantaran sungai, yang



pada akhirnya menyumbang terjadinya banjir (Yuri et al., 2025). Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup program edukasi lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari kebijakan pengendalian banjir yang komprehensif.

Temuan wawancara di Sukamenanti mendukung gambaran tersebut. Sejumlah narasumber mengakui bahwa sebagian warga masih membuang sampah ke kali yang berada di dekat permukiman, sebuah kebiasaan yang secara langsung menyumbat aliran air dan mengurangi kapasitas tampung kali sehingga mudah meluap saat hujan deras.

d) *Faktor lain: Luapan Kali dan Kondisi Topografi Permukiman*

Selain ketiga faktor di atas, hasil wawancara lapangan di wilayah Sukamenanti mengungkap dua faktor tambahan yang turut berkontribusi terhadap kejadian banjir, yakni luapan kali yang berada di dekat permukiman serta kondisi topografi kawasan yang lebih rendah dibandingkan elevasi aliran air di sekitarnya.

Mengenai luapan kali, para narasumber menyatakan bahwa kali di dekat permukiman kerap meluap ke kawasan hunian warga, terutama saat hujan deras. Hal ini sejalan dengan kajian ilmiah yang menyatakan bahwa wilayah yang terletak di dataran lebih rendah dari badan sungai sangat rentan terhadap banjir, karena saat musim hujan, tanggul tidak mampu menampung debit air yang tinggi sehingga air sungai meluap ke permukiman (Yutantri et al., 2023). Penyebab utama yang turut memperparah kondisi tersebut adalah dangkalnya saluran utama sungai dan penyempitan akibat tumpukan sampah, yang mengakibatkan limpasan air hujan ke daratan sekitar (Yutantri et al., 2023).

Terkait kondisi topografi, warga yang bermukim di wilayah terdampak menyatakan bahwa lokasi hunian mereka memang berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya. Faktor topografi ini diakui secara ilmiah sebagai salah satu penyebab kerentanan banjir yang bersifat alamiah. Banjir dapat terjadi karena daerah yang biasanya kering tergenang akibat curah hujan tinggi di wilayah berdataran rendah dan cekung, atau karena kapasitas air yang melebihi debit sistem aliran sungai (Yuri et al., 2025). Posisi topografis yang lebih rendah menjadikan kawasan ini sebagai tempat penampungan air alami yang tidak disertai infrastruktur pengelolaan air yang memadai, sehingga potensi genangan dan banjir sangat tinggi setiap kali hujan berintensitas tinggi terjadi.

Secara keseluruhan, penyebab banjir di wilayah Sukamenanti bersifat multidimensional, yakni merupakan hasil interaksi antara faktor alam seperti curah hujan dan topografi dataran rendah dengan faktor antropogenik berupa buruknya kondisi drainase dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Interaksi antara faktor alam dan manusia secara signifikan meningkatkan frekuensi dan dampak banjir (Yuri et al., 2025), dan kondisi ini menuntut respons kebijakan publik yang tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif dan berbasis partisipasi masyarakat.

C. Dampak Banjir terhadap Masyarakat

a) *Dampak sosial*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT dan beberapa warga di wilayah Gang Masjid 3, Sukamenanti, banjir memberikan dampak terhadap aktivitas sosial masyarakat. Ketika banjir terjadi, aktivitas sehari-hari warga menjadi terganggu karena sebagian waktu dan tenaga difokuskan untuk menyelamatkan barang-barang di dalam rumah serta membersihkan sisa genangan setelah banjir surut. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kelelahan fisik dan berkurangnya kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu, banjir juga memengaruhi mobilitas warga, terutama ketika genangan air cukup tinggi sehingga akses keluar-masuk lingkungan menjadi lebih sulit. Gangguan terhadap aktivitas sosial merupakan salah satu konsekuensi yang umum terjadi pada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Banjir tidak hanya berdampak pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan menurunkan kualitas hidup sementara waktu (Sarifah et al., 2024). Dampak sosial tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan keberlangsungan aktivitas masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan publik.

b) *Dampak ekonomi*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banjir menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Genangan air yang masuk ke dalam rumah menyebabkan beberapa barang rumah tangga mengalami kerusakan. Warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan rumah maupun memperbaiki barang yang terdampak banjir. Meskipun kerugian yang dialami setiap rumah tangga berbeda-beda, kondisi ini tetap memberikan beban ekonomi bagi masyarakat.

Kerugian ekonomi akibat banjir merupakan dampak yang sering ditemukan pada wilayah yang mengalami genangan secara berulang. Kerusakan harta benda dan meningkatnya pengeluaran rumah tangga menjadi salah satu bentuk kerentanan ekonomi masyarakat terhadap bencana banjir (Ratnaningsih et al., 2023). Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan mitigasi dan pengendalian banjir yang mampu mengurangi potensi kerugian ekonomi masyarakat melalui perbaikan sistem drainase, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kesiapsiagaan warga (Fajar & Rafi, 2023).

c) *Dampak lingkungan dan kesehatan.*

Banjir yang terjadi di wilayah penelitian juga menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Air banjir yang menggenangi permukiman umumnya bercampur dengan lumpur dan kotoran sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kurang bersih. Setelah banjir surut, warga harus melakukan pembersihan rumah dan lingkungan untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

Dari aspek kesehatan, beberapa warga mengaku mengalami kelelahan akibat aktivitas membersihkan rumah dan menyelamatkan barang-barang selama banjir berlangsung. Selain itu, genangan air yang kotor berpotensi meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan seperti penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan apabila tidak segera ditangani dengan baik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Christian et al. (2023) yang menyatakan bahwa banjir dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat melalui peningkatan paparan terhadap lingkungan yang tercemar dan berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Dampak lingkungan dan kesehatan ini menunjukkan bahwa penanganan banjir perlu dilakukan secara komprehensif. Kebijakan publik tidak hanya berfokus pada pengurangan genangan air, tetapi juga perlu memperhatikan aspek kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang memadai, pengelolaan drainase yang baik, serta edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat setelah banjir terjadi (Gebrillia, 2025). Hal tersebut penting untuk mengurangi risiko dampak lanjutan yang dapat dirasakan masyarakat pascabanjir.

D. Upaya Penanganan Banjir yang Telah Dilakukan

a) *Upaya masyarakat*

Masyarakat di lingkungan Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 secara aktif melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko banjir

yang terjadi di lingkungan mereka. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah gotong royong membersihkan saluran drainase, selokan, dan lingkungan sekitar dari sampah maupun endapan sedimen yang dapat menghambat aliran air saat hujan turun. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara bersama-sama oleh warga dengan koordinasi dari Ketua RT dan Ketua Lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Selain membersihkan saluran drainase, masyarakat juga berupaya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air dan sungai. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosial dan kerja bakti yang dilakukan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mengurangi potensi penyumbatan saluran drainase yang dapat menyebabkan genangan air dan banjir.

Masyarakat juga berpartisipasi dalam program pengumpulan sampah plastik yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Sampah plastik yang dikumpulkan dari rumah tangga dibawa ke tempat pengumpulan yang berada di kediaman Ketua Lingkungan untuk dipilah dan selanjutnya disalurkan kepada pihak pengelola daur ulang. Kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan banjir melalui pengurangan sampah yang berpotensi menyumbat saluran drainase.

Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan risiko banjir di kawasan permukiman. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan terbukti mampu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan banjir karena masyarakat menjadi aktor utama yang berinteraksi langsung dengan kondisi lingkungan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang baik, berbagai permasalahan lingkungan yang dapat memicu terjadinya banjir dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

b) *Peran RT/kelurahan*

RT dan pihak Kelurahan Sukamenanti memiliki peran penting dalam upaya penanganan dan pencegahan banjir di lingkungan Jalan Beruang Gang Mushola RT 03. Peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kerja bakti membersihkan saluran drainase, pengangkutan sampah yang berpotensi menyumbat aliran air, serta



pemantauan kondisi lingkungan yang rawan mengalami genangan saat musim hujan.

Selain itu, RT dan kelurahan juga berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta meningkatkan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Sosialisasi tersebut dilakukan sebagai upaya preventif agar masyarakat memahami bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh perilaku manusia yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Dalam aspek koordinasi pemerintahan, RT dan kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Berbagai keluhan dan usulan masyarakat mengenai kondisi drainase, genangan air, maupun kebutuhan perbaikan infrastruktur lingkungan disampaikan kepada dinas yang berwenang untuk mendapatkan tindak lanjut. Melalui peran tersebut, RT dan kelurahan menjadi pihak yang membantu mempercepat proses penanganan berbagai permasalahan lingkungan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian, RT dan pihak kelurahan juga mendukung pelaksanaan program pengumpulan sampah plastik yang dilakukan setiap hari Jumat sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi risiko penyumbatan saluran drainase. Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi kegiatan, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pengawasan pelaksanaan program agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keterlibatan pemerintah tingkat lokal menjadi unsur penting dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat sehingga upaya pencegahan banjir dapat berjalan lebih efektif (Purwendah, Rusito, & Periani, 2022). Dengan adanya kerja sama antara RT, kelurahan, dan masyarakat, berbagai program penanganan lingkungan dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir sehingga mampu mendukung pengurangan risiko banjir di kawasan permukiman.

c) *Program pengumpulan sampah untuk didaur ulang*

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir adalah melalui program pengumpulan sampah plastik untuk didaur ulang. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat dengan melibatkan masyarakat di lingkungan

sekitar. Warga mengumpulkan sampah plastik yang berasal dari rumah tangga, seperti botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, dan jenis sampah plastik lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa ke tempat pengumpulan yang berada di kediaman Ketua Lingkungan untuk selanjutnya dipilah dan disalurkan kepada pihak pengelola atau pengepul sampah daur ulang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang berpotensi mencemari lingkungan dan menyumbat saluran drainase maupun aliran sungai. Keberadaan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik sering menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air sehingga meningkatkan risiko terjadinya genangan dan banjir pada kawasan permukiman. Oleh karena itu, pengumpulan sampah plastik secara berkala menjadi langkah preventif dalam menjaga fungsi drainase agar tetap berjalan dengan baik.

Selain memberikan manfaat lingkungan, program ini juga merupakan bentuk implementasi kebijakan publik berbasis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan risiko bencana banjir. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung upaya mitigasi banjir. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) terbukti dapat meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat sekaligus mengurangi pencemaran yang berpotensi memicu terjadinya banjir (Ambarwati, Yulianto, & A'yunina, 2022). Dengan adanya program pengumpulan sampah plastik setiap hari Jumat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan pencegahan banjir dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

d) *Bantuan atau tindakan pemerintah*

Pemerintah memiliki peran dalam upaya penanganan banjir melalui perbaikan infrastruktur, pemeliharaan saluran drainase, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun, berdasarkan kondisi di lokasi penelitian, bantuan dari pemerintah tidak diberikan secara rutin dan umumnya hanya diberikan ketika terjadi banjir dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi dan menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, bantuan yang diberikan pemerintah biasanya berupa bantuan kebutuhan pokok (sembako) bagi warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diberikan

untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat akibat banjir. Selain bantuan sembako, pemerintah terkadang melakukan pembersihan saluran drainase atau penanganan pada titik-titik yang mengalami genangan apabila kondisi banjir dinilai memerlukan tindakan lebih lanjut.

Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa upaya penanganan banjir lebih banyak dilakukan melalui swadaya dan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan bantuan langsung dari pemerintah. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui perbaikan drainase, pengelolaan sampah, dan peningkatan kapasitas lingkungan dalam mengurangi risiko banjir.

E. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

a) Analisis efektivitas upaya yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, berbagai upaya penanganan banjir telah dilakukan oleh masyarakat, RT, dan Kelurahan Sukamenanti, seperti kegiatan gotong royong membersihkan drainase, pengumpulan sampah plastik untuk didaur ulang, serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dari perspektif kebijakan publik, upaya tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan penanganan bencana banjir. Mursyidah (2024) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir karena masyarakat menjadi aktor yang berinteraksi langsung dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut terlihat pada masyarakat Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 yang secara rutin melakukan pembersihan saluran drainase dan pengelolaan sampah lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Soleh (2021) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan drainase merupakan komponen penting dalam mitigasi banjir berbasis masyarakat.

Selain masyarakat, RT dan kelurahan juga telah menjalankan fungsi koordinasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Dalam kajian kebijakan publik, peran pemerintah lokal sangat penting karena menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pemerintah. Hapsari dan Rahman (2024) menyatakan bahwa keberhasilan penanganan

banjir memerlukan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun demikian, apabila dilihat dari kondisi banjir yang masih terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi, upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan struktural masih ditemukan, seperti kapasitas drainase yang terbatas, sedimentasi saluran, berkurangnya daerah resapan air, serta luapan kali di sekitar permukiman. Dengan demikian, upaya yang dilakukan saat ini lebih banyak berkontribusi dalam mengurangi dampak banjir, tetapi belum mampu menghilangkan penyebab utama banjir secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum didukung secara optimal oleh kebijakan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

b) Kendala yang masih dihadapi

Kendala utama yang masih dihadapi dalam penanganan banjir di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 adalah kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Beberapa saluran mengalami penyempitan, sedimentasi, dan penyumbatan akibat sampah sehingga menghambat aliran air menuju saluran utama.

Selain itu, perkembangan kawasan permukiman menyebabkan semakin berkurangnya lahan terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Akibatnya, sebagian besar air hujan berubah menjadi limpasan permukaan (runoff) yang langsung masuk ke saluran drainase dan meningkatkan risiko genangan.

Kendala lain yang masih ditemukan adalah belum meratanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun sebagian besar warga telah berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, masih terdapat perilaku membuang sampah ke saluran air maupun kali yang berpotensi menyebabkan penyumbatan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas mitigasi banjir di berbagai daerah. Hasil penelitian Auliya, Juita, dan Putri (2024) menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan sebagian masyarakat dalam kegiatan mitigasi banjir dapat mengurangi efektivitas program pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan kegiatan lingkungan.



Dari sisi kebijakan publik, keterbatasan intervensi pemerintah juga menjadi kendala. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan pemerintah lebih banyak diberikan ketika banjir telah terjadi dan menimbulkan dampak yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung responsif dibandingkan preventif. Padahal, kebijakan publik yang efektif seharusnya lebih menekankan pada upaya pencegahan sebelum bencana terjadi.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat masih perlu diperkuat. Sukartara dan Romadhona (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan banjir sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

c) *Rekomendasi solusi bagi pemerintah dan masyarakat*

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kualitas infrastruktur drainase melalui normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, dan perbaikan drainase yang rusak guna mengurangi risiko banjir saat curah hujan tinggi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan mitigasi banjir berbasis masyarakat dengan melibatkan warga dalam berbagai program penanggulangan banjir sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif (Fajar & Rafi, 2023).

Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga perlu diperkuat melalui program daur ulang dan bank sampah yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sumur resapan, lubang biopori, serta ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan untuk mengurangi limpasan air dan mendukung fungsi daerah resapan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

Selain itu juga, masyarakat perlu mempertahankan dan meningkatkan kegiatan gotong royong yang selama ini telah dilaksanakan. Kegiatan pembersihan drainase secara rutin dapat membantu menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi risiko genangan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah ke drainase maupun sungai. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mendukung kebijakan pengurangan risiko banjir. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan lingkungan melalui penanaman pohon, pembuatan biopori, maupun sumur resapan sederhana di sekitar rumah. Langkah tersebut dapat membantu

meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

Terakhir, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir melalui pemahaman mengenai tindakan darurat, jalur evakuasi, dan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan sebelum maupun saat banjir terjadi. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, penanganan banjir di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, permasalahan banjir di Jalan Beruang Gang Mushola RT 03, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu curah hujan yang tinggi, kondisi drainase yang belum optimal, berkurangnya daerah resapan air, perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta luapan kali di sekitar permukiman. Kondisi tersebut menyebabkan banjir masih sering terjadi dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, serta kesehatan bagi masyarakat. Penanganan banjir yang telah dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat, RT, dan kelurahan menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam upaya pengurangan risiko banjir. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu mengatasi permasalahan banjir secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih preventif melalui peningkatan kualitas drainase, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penambahan daerah resapan air, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penanganan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu saran yang kami berikan agar Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kerja sama dalam penanganan banjir melalui perbaikan dan pemeliharaan drainase secara berkala, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta peningkatan daerah resapan air. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan perlu terus ditingkatkan agar upaya pencegahan dan penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, L., Yulianto, P. D., & A'yunina, Q. (2022). *EMAS (Edukasi dan Motivasi Masyarakat) sebagai Pecut Changing Behavior dalam Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta*. Jurnal Jarlit, 18(1). DOI: <https://doi.org/10.70154/jid.v18i1.34>
- Auliya, A. N., Juita, E., & Putri, R. E. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. *JPIG (Jurnal*

- Pendidikan dan Ilmu Geografi*), 9(2), 130-138. <https://doi.org/10.21067/jpig.v9i2.10628>
- Cahyono, C., & Miguez, M. G. (2024). Analisis Kapasitas dan Kinerja Saluran Drainase terhadap Perubahan Tata Guna Lahan Perkotaan. *RESWARA: Jurnal Riset Ilmu Teknik*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.70716/reswara.v2i1.376>
- Christian, K. R., Hendrasarie, N., & Ali, M. (2023). Evaluasi Dampak Banjir Pada Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 1923-1932.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Fajar, M. F. A., & Rafi, M. R. Y. (2023). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 10-31.
- Fajar, M. F. A., & Rafi, M. R. Y. (2023). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 10-31.
- Gebrillia, R. G. (2025). Analisis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Kesehatan dan Sains Medis*, 1(1), 1-8.
- Hapsari, A. A. H. A., & Rahman, A. Z. (2024). Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) dari Tahun 2018-2023. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 170-186.
- Irawan, D. N., Kushartono, T., & As, Z. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(3).
- Jauhari, H. M., Murti, I., & Hartono, S. (2025). Analisis Kerentanan Dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Gresik. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 5(04), 75-81.
- Kodepos.co.id. (2026). *Kelurahan Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*. Diakses dari: [Kodepos Sukamenanti](https://kodepos.co.id/kelurahan-sukamenanti)
- Mursyidah, L. (2024). Community Participation In Flood Disaste Management. *Indonesian Journal Of Law And Economics Review: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 19(4).
- Purwendah, E. K., Rusito, & Periani, A. (2022). *Kewajiban Masyarakat dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 111-120. DOI: <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1609>
- Ratnaningsih, T. K., Rahayu, H. C., Lestari, E. P., Sultan, S., & Fathoni, A. (2023). Dampak sosial ekonomi bencana banjir dan pemetaannya berbasis sistem informasi geografis (SIG). *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 318-330.
- Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Thamrin, M. H., Mumtahanah, S., Harahap, S. K. N., Marbun, C. M., & Tampubolon, M. F. (2024). Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Perilaku Pembuangan Sampah dan Upaya Pencegahan Risiko Banjir di Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(1), 1-10.
- Sarifah, F., Arashi, F. B., Iskandar, A. L., Ramadhan, M. A. R., Daniswara, M. P., & Rahmadhani, F. (2024). Analisis Dampak Bencana Banjir terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat: Analysis of the Impact of Flood Disaster on Social and Economic Conditions in the Society. *BANDAR: JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING*, 6(2), 56-64.
- Soleh. (2021). *Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat di Wilayah Sungai Citarum Hulu*. *Aspirasi*, 12(1), 1-12. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/89>
- Sukartara, N., & Romadhona, M. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4183-4190.
- Tunjang, A. A. (2023). Penyebab Banjir Dan Upaya Perbaikannya Di Saluran Drainase Jl. G. Obos IX Kota Palangka Raya. *CRANE: Civil Engineering Research Journal*, 4(2), 41-48.
- Yuri, C., Chikal, Rinal, & Ikhwan. (2025). Analisis Faktor Alam dan Manusia Penyebab Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(5), 8388-8401.
- Yutantri, V., Suryandari, R. Y., Putri, M. N., & Widyawati, L. F. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Perumahan Total Persada Raya Kota Tangerang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 199-214.